

2017

**PROPOSAL PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR
TANAH LONGSOR SERTA ANGIN PUTING BELIUNG
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PROPOSAL



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi	17
	2.3. Isu Penting Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	18
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN SKPD	21
	3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016	21
	3.2. Program dan Kegiatan	23
BAB IV	PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, topografis dan sosiologis termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Dari 14 jenis bencana yang kerap terjadi di Indonesia, 11 diantaranya terjadi di Provinsi NTB. Secara geografis, Provinsi NTB terletak pada lempengan bumi yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) sehingga rentan dengan gempa bumi. Begitu pula dengan kondisi klimatologis yang dapat menimbulkan cuaca ekstrim dan angin puting beliung. Dari segi kondisi topografis yang berbukit-bukit memberi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Selain kondisi alam tersebut, kondisi sosiologis Provinsi NTB yang di satu sisi memberi dampak positif bagi pembangunan daerah namun disisi lain juga sering menimbulkan konflik sosial. Beberapa jenis bencana tersebut memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan konflik antar warga. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada RPJMD 2013-2018 telah menjadikan isu kebencanaan sebagai salah satu urusan penting dalam pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam misi ketujuh

Penanganan kebencanaan secara koordinatif oleh Pemerintah Provinsi NTB terus ditingkatkan sejak terbentuknya BPBD Provinsi NTB tahun 2009 melalui Pergub NTB Nomor 49 Tahun 2009. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penanganan kebencanaan di Provinsi NTB terus menunjukkan kinerja yang baik, bahkan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam penanganan saat terjadi bencana (tanggap darurat) tahun 2012 dan kesiapsiagaan penanganan bencana tahun 2013. Namun demikian, BPBD Provinsi NTB ibarat bayi yang baru tumbuh memerlukan perhatian lebih guna mencapai kondisi yang diinginkan. Untuk itu, Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi NTB pada tahun 2016 perlu dibuat seoptimal mungkin mampu memberi ruang gerak yang maksimal guna terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018.

Hal ini sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan baik rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah maupun rencana tahunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun RKPD yang disusun setiap tahunnya, wajib ditindaklanjuti oleh setiap SKPD dengan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004. Renja SKPD memuat strategi pencapaian kinerja sebagaimana direncanakan dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD dengan memperhatikan RKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Nusa Tenggara Barat tahun 2016 telah disusun dan merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan berdasarkan pertimbangan dan aspirasi yang disampaikan dalam musrenbang. Menindaklanjuti RKPD Provinsi NTB Tahun 2016, BPBD Provinsi NTB menyusun Renja Tahun 2016 sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2016.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nusa Tenggara Barat.
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018.
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor .. Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 adalah terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan penanganan kebencanaan antar sektor dan wilayah serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai penjabaran RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016;
2. Terselenggaranya upaya penanggulan bencana yang bersifat koordinatif dan integratif secara optimal;
3. Terselenggaranya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana/*Reduce Risk Disaster* (RAN PRB) di Provinsi NTB;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, menguraikan beberapa sub topik yaitu;

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra;

Review terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Tahun 2014 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2015 (tahun n-1) berdasarkan APBD tahun 2015 dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2013-2018.

Analisis Kinerja Pelayanan Rencana Kerja;

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan yang diukur berdasarkan indikator kinerja baik dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan PP No.6 tahun 2008 dan PP Nomor 38 tahun 2007. Indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi NTB, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

Menguraikan tentang isu-isu terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Provinsi NTB, termasuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai visi dan misi. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan sebagai langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan;

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi baik disampaikan langsung kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN***

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional khususnya kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan isi dari Rencana Strategis Daerah yang didahului dengan analisis. Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat diketahui berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dokumen pertanggung-jawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tahun 2014 dan perkiraan target pencapaian tahun 2015 dan rencana kinerja tahun 2016. Adapun pengukuran Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan dokumen lainnya. Adapun penetapan indikator kinerja sekretariat dan bidang teknis masing-masing sebagai berikut :

A.1. Sekretariat

Indikator kinerja pelayanan BPBD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BPBD pada Sekretariat

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2014	2015
1.	Pelayanan surat menyurat	1 hari	1 hari
2.	Pelayanan kepegawaian	1 hari	1 hari
3.	Pelayanan keuangan	1 hari	1 hari
4.	Pelayanan data dan informasi bencana	1 hari	1 hari

A.2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Gambaran kinerja pelayanan BPBD pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja SKPD pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2014 dan 2015
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana, prasarana dan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana

A.3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Gambaran kinerja pelayanan BPBD pada Bidang Kedaruratan dan Logistik selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja BPBD pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2014 dan 2015
1.	Penanganan keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia
2.	Penanganan Logistik	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (makan, minum dan kesehatan)

A.4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran kinerja pelayanan BPBD pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Capaian Kinerja BPBD pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2014 dan 2015
1.	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik dan non fisik agar dapat berfungsi kembali
2.	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk keperluan analisis terhadap capaian kinerja BPBD Provinsi NTB, data realisasi keuangan dan fisik tahun 2014 dan 2015 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

B.1 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2014

Realisasi keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 4.861.509.057 atau 92,98 persen dan realiasi fisik mencapai 100 persen dengan rincian realisasi program seperti pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2014

No.	Program/Kegiatan	Jml Anggaran Rp.	Rrealisasi			Sisa (Rp.)
			Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	%	
	APBD 2014	5.228.533.500	4.861.509.057	92.98	100	367.024.443
A.	Non Program (BTL)	3.383.102.000	3.091.221.963	91,37	100	291.880.037
B.	PROGRAM DAN KEGIATAN (BL)	1.845.431.500	1.770.287.094	95,93	100	75.144.406
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	733.573.500	705.515.431	96,18	100	28.058.069
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	530.195.000	517.531.263	97,61	100	12.663.737
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.800.000	36.224.000	98,43	100	576.000
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	57.254.000	51.829.950	90,53	100	5.424.050
5.	Program pencegahan dini dan penang-gulangan korban bencana alam	151.775.000	150.811.600	99,37	100	963.400
6.	Program penanganan Tanggap Darurat dan evakuasi/penyelamatan Korban Bencana	310.834.000	283.386.350	91,17	100	27.447.650
7.	Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	25.000.000	24.988.500	99,95	100	11.500

Terdapat dua program dengan tingkat realisasi keuangan dibawah prosentase realisasi keuangan Belanja Langsung yaitu Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (90,53%) dan Program penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/penyelamatan Korban Bencana (91,17%). Adapun penyebab rendahnya realisasi keuangan kedua rogram ini yaitu adanya kesalahan administrasi penetapan jumlah personil penyusun laporan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan lemahnya koordinasi penanganan tanggap darurat bencana pada penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/penyelamatan Korban Bencana.

B.2. Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2015

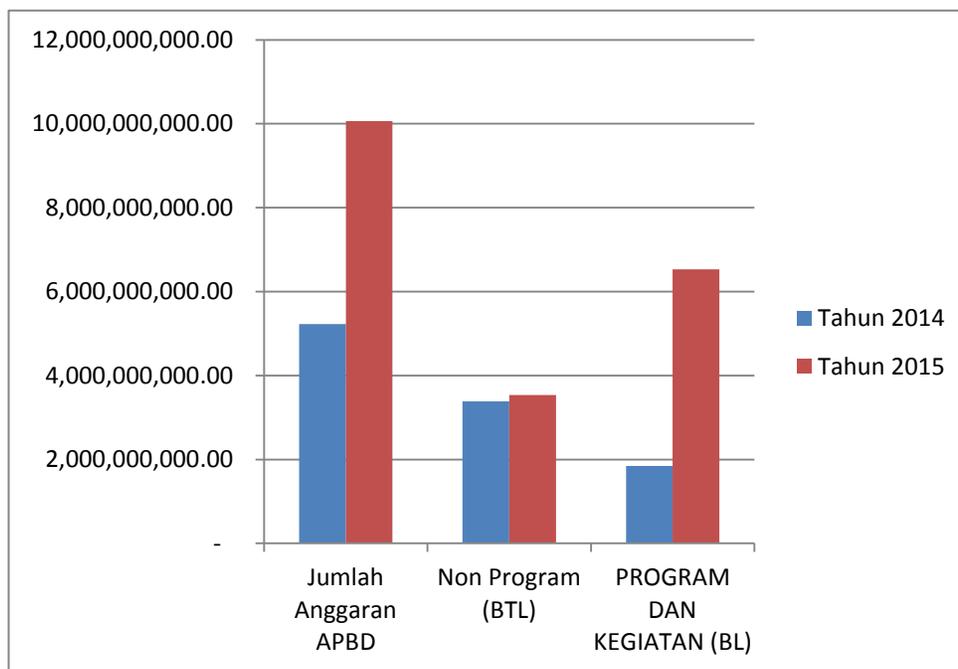
Realisasi keuangan tahun 2015 sampai dengan bulan maret mencapai Rp. 482.209.241 atau 4,79% dari total anggaran Rp. 10.066.502.980. Apabila dirinci berdasarkan jenis belanja maka realisasi keuangan untuk Belanja Langsung baru mencapai Rp. 124.292.161 atau 1,90% dari Rp. 6.532.869.500. Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang mendapatkan alokasi anggaran kas pada triwulan I belum dilaksanakan. Adapun rincian realisasi seperti pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6 Realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2015

No	Program/Kegiatan	Jml Anggaran Rp.	Rrealisasi		Sisa	
			Keuangan			Fisik
			Rp.	%		%
	APBD 2015	10.066.502.980	482.209.241	4,79		9.584.293.739
A.	Non Program (BTL)	3.533.633.480	357.917.080	10,13		3.175.716.400
B.	PROGRAM DAN KEGIATAN (BL)	6.532.869.500	124,292,161	1.90	0,00	6,408,577,339
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.296.864.000	58,821,260	4.54	0,00	1,238,042,740
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.190.745.500	22,728,001	1.91	0,00	1,168,017,499
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	109.400.000	-	-	0,00	109,400,000
4.	Program Siaga Darurat Bencana	1.171.354.000	-	-	0,00	1,171,354,000
5.	Program Tanggap Darurat Bencana	109.170.000	8,980,000	8.23	0,00	100,190,000
6.	Program Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan	631.832.500	-	-	0,00	631,832,500
7.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	6702.97.500	25,280,000	3.77	0,00	645,017,500
8.	Program penanganan Tanggap Darurat dan evakuasi/penyelamatan Korban Bencana	45.642.000		-	0,00	45,642,000

9.	Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	568520000	4,845,400	0.85	0,00	563,674,600
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	124.319.000		-	0,00	124,319,000
11.	Pengembangan Data /Informasi	43.640.000		-	0,00	43,640,000
12.	Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB	571.085.000	3,637,500	0.64	0,00	567,447,500

B.3. Struktur Anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2015



Gambar 1 : Grafik struktur anggaran tahun 2014 dan 2015

Dari gambar 1 diatas terlihat bahwa struktur anggaran BPBD Provinsi NTB tahun 2014 berubah pada tahun 2015. Pada tahun 2014 nilai Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.383.102.000 atau 64,70% dari total anggaran dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.845.431.500 Atau 35,30%. Pada Tahun 2015, terjadi peningkatan anggaran secara drastis pada Belanja Langsung yaitu Rp. 6.532.869.500 atau 64,90% dari total anggaran sebesar Rp. 10.066.502.980. Dengan adanya peningkatan anggaran ini tentu diharapkan mampu mempercepat pencapaian misi ketujuh Pemerintah Provinsi NTB yaitu “Memulihkan keseimbangan lingkungan dan

menerapkan pembangunan berkelanjutan” dalam rangka pencapaian visi “*Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera*”. Dengan demikian maka fungsi komando dan koordinator dalam penyelenggaraan PB di Provinsi NTB, BPBD Provinsi NTB dapat bekerja secara optimal mulai dari pra bencana, saat bencana sampai pada pasca bencana. Permasalahan tahun 2013 dan 2014 yang menyebabkan fungsi tersebut belum optimal karena rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih minimnya kapasitas SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik lintas sektor maupun lintas wilayah dapat teratasi pada tahun 2015 ini.

Kinerja BPBD Provinsi NTB dapat lebih komprehensif, sistematis dengan adanya peningkatan program dan kegiatan pada tahun 2015. Untuk itu beberapa strategi dan kebijakan dapat dibuat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan PB sebagaimana termuat dalam Renstra BPBD Provinsi NTB tahun 2013-2018 sebagai berikut :

- a. Mendorong rasa tanggung-jawab aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijakan.
- b. Pengembangan SDM melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur.
- c. Meningkatkan kemampuan teknis aparat.
- d. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
- e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
- f. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- g. Membangun kemampuan dan kolektifitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana.
- h. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.

- i. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- j. Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- k. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan PB di Provinsi NTB dengan arah kebijakan :
 - Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan PB sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB.
 - Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi Pemerintah Kab/Kota dan lintas sektor.

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/D Pebruari 2015 (Tahun Berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Progran & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Masuk/Keluar	1000 surat	200 surat	200 surat	200 surat	100	200 surat	20 surat	10,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik	Terpenuhi nya kebutuhan 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 bulan	8,33
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan R2 yang dipelihara, dan		6 unit	6 unit	6 unit	100	14 unit	0	0
		Jumlah Kendaraan R4 yang dipelihara, dan		19 unit	19 unit	19 unit	100	19 unit	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen laporan keuangan	114 dok	19 dok	19 dok	19 dok	100	19 dok	0	0
		Dokumen laporan Asset dan Barang	54 dok	9 dok	9 dok	9 dok	100	9 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kontrak Clening Service yang dipekerjakan	8 orang/tahun	5 orang	4 orang	4 orang	100	8 orang	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Terpenuhi nya ATK 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 bulan	8,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran, majalah	42 eksp	7 eksp	7 ekspl	7 eksp	100	7 eksp	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat/tamu	2500 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100	500 orang	-	-
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	30 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	30 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga kontrak Satpam yang dipekerjakan	52 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100	10 orang	1 bulan	8,33
1.19 . 1.19.03 . 01 . 27	Rapat Koordinasi Teknis penanggulangan bencana tingkat Provinsi	Dokumen hasil rakornis	12 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 28	Rapat Kerja Teknis penanggulangan bencana Tingkat Provinsi	Dokumen hasil rakernis	14 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	3 dok	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 29	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana BPBD Kab/Kota	Dokumen hasil kajian Monev PB	10	dok	1 dok	1 dok	100	2 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Garasi, Pagar Keliling, Gudang, Tempat Ibadah, Gedung PUSDALOPS	5 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	3 paket	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mobil	19 mobil	0	1 mobil	1 mobil	100	3 mobil	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional pertahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Rutin/berkala peralatan kantor pertahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100	0	0	0
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01	Penyusunan Peraturan Gubernur (PERGUB) Kebencanaan (2014)	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100	0	0	0
1.19 . 1.19.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lakip, Laporan tahunan	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 06 . 05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Renja, Renstra,, RKA/DPA, RKAP/DPAP	16 dok	3 dok	4 dok	4 dok	100	3 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 08	Program Siaga Darurat Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 08 . 02	Geladi Posko dan Geladi Lapang Penanggulangan Bencana	Jml aparaturn dan masyarakat peserta gladi PB	1 kali	0	0	0	0	1 Kali	0	0
1.19 . 1.19.03 . 08 . 04	Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana		4 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 08 . 05	Koordinasi dan konsultasi penanggulangan Bencana		0	0	0	0	0	1 kpts	0	0
1.19 . 1.19.03 . 09	Program Tanggap Darurat Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 09 . 01	Monitoring dan Evaluasi Kedaruratan Bencana	Jml dokumen PB	40 dok	0	0	0	0	10 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 10	Program Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan		0	0	0	0	0			
1.19 . 1.19.03 . 10 . 01	Perbaikan Lingkungan daerah bencana	Tertanganinya korban bencana masa transisi darurat bencana	2 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0
1.19 . 1.19.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam									
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam									
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04	Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya bencana									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05	Kegiatan Tahunan dalam rangka Bulan Pengurangan Resiko Bencana se Dunia	Jumlah personil yg mengikuti PRB	100 orang	7 orang	20 orang	7 orang	35	20 orang	0	0
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi BPBD	Jumlah aparat/masy yg dilatih	60 orang	0	30 orang	30 orang	100	30 orang	0	0
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15	Fasilitas Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Jumlah sekolah aman bencana	20 sekolah	0	0	0	0	5 sekolah	0	0
1.19 . 1.19.03 . 24	Program penanganan Tanggap Darurat dan evakuasi/penyelamatan Korban Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 24 . 05	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Dokumen hasil pemantauan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	0	0
1.19 . 1.19.03 . 25	Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 25 . 02	Verifikasi Tingkat Kerusakan Paskabencana	Jumlah dokumen hasil verifikasi	60 dok	4 dok	10 dok	10 dok	100	10 dok	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 25 . 03	Pemberian bahan bantuan bangunan untuk perbaikan rumah masyarakat pasca bencana									
1.19 . 1.19.03 . 25 . 06	Pengadaan Bahan Banjiran	Jml Bronjong	0	0	0	0	0	1000 m3	0	0
		Jml Karung	0	0	0	0	0	10000 lbr	0	0
1.19 . 1.19.03 . 25 . 10	Rapat Koordinasi Teknis pasca rehabilitasi dan rekontruksi	Jml dok rapat	4 dok	0	0	0	0	1 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 26	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	0	0	0	0	0	0			
1.19 . 1.19.03 . 26 . 01	Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Jml profil	4 profil	0	0	0	0	1 profil	0	0
1.19 . 1.19.03 . 27	Pengembangan Data /Informasi									
1.19 . 1.19.03 . 27 . 02	Pembentukan Sisitem Informasi Geografis (SIG) di Pusdalops	Jml peta informasi	4 peta	0	0	0	0	1 peta	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Progran & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 31	Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB									
1.19 . 1.19.03 . 31 . 02	Fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jml org yg dilatih dan desa tangguh bencana	300 org, 10 desa	0	0	0	0	60 org, 2 desa	0	0
1.19 . 1.19.03 . 31 . 03	Monev Kinerja Desa Tangguh Bencana	Jml dok hasil monev	5 dok	0	0	0	0	1 dok	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi

BPBD Provinsi NTB yang terbentuk sejak tahun 2009 melalui Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yang tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 3 Tahun 2009 yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sejauh mana tugas pokok dan fungsi diatas telah dilaksanakan? Analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dan 2015 dapat memberi gambaran statistik yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk pelaksanaan upaya PB pada tahun berikutnya. Realisasi keuangan tahun 2014 sebesar 92,98% disebabkan oleh anggaran BTL tidak terserap sebesar Rp. 291.80.037 sehingga realisasi keuangan hanya mencapai 91,37% dan serapan BL hanya mencapai 95,93% disebabkan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai pada masing-masing program yang secara keseluruhan sebesar Rp.75.144.406.

Realisasi keuangan terendah terjadi pada program rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan PB yaitu 12,60%. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi penanganan pasca bencana dengan BPBD Kab/Kota di lokasi bencana sehingga kegiatan verifikasi tingkat kerusakan bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya realisasi keuangan pada program penanganan tanggap darurat dan evakuasi/ penyelamatan korban bencana yaitu 78,84% menunjukkan masih lemahnya koordinasi saat tanggap darurat sehingga penanganan bantuan logistik tidak optimal. Program-program dengan sisa anggaran yang cukup besar yaitu program pelayanan administrasi perkantoran (Rp.28.058.069), program penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana (Rp. 27.447.650), dan program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur (Rp. 12.663.737). Penyebab terjadinya sisa anggaran dari ketiga program tersebut sebagai berikut :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran (Rp.28.058.069);
 - Terjadinya efisiensi pada belanja penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sebesar Rp. 11.676.509
 - Terjadinya penghematan pada belanja makan dan minum sebesar Rp. 4.080.000 dan belanja keamanan kantor sebesar Rp. 4.080.000
- b. program penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana (Rp. 27.447.650);
 - Efisiensi belanja pelatihan tanggap darurat dan evakuasi pemuda/pelajar sebesar Rp. 6.990.000;
 - Terjadi kendala waktu dalam belanja siaga darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 20.357.100.
- c. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Rp. 12.663.737).
 - Terjadinya efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 11.263.737.

Meskipun realisasi keuangan kurang dari 100%, namun realisasi fisik mencapai 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa pembelanjaan telah dilakukan secara efisien khususnya di bidang kesekretariatan. Namun tidak demikian halnya pada bidang teknis penanganan tanggap darurat bencana kekeringan dimana terjadinya sisa anggaran disebabkan adanya kendala teknis peraturan keuangan. Meskipun pada dasarnya jumlah anggaran tahun 2014 tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2013, tingkat kinerja pelayanan organisasi secara terus menerus ditingkatkan.

Mencermati kinerja pelayanan tahun 2013/2014 yang memperlihatkan adanya peningkatan dan urusan kebencanaan di Provinsi NTB makin meningkat, maka pada tahun 2015 terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan sebesar 92,53% yaitu dari Rp. 5.228.533.500 (2014) menjadi Rp. 10.066.502.980 (2015). Peningkatan alokasi

anggaran tahun 2015 dibarengi dengan penambahan sejumlah program dari tahun sebelumnya yaitu:

- a. Program Siaga Darurat Bencana
- b. Program Tanggap Darurat Bencana
- c. Program Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- e. Pengembangan Data /Informasi
- f. Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB

Terdapat satu program pada tahun 2014 tidak dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dari enam program tambahan tahun 2015 terdapat 4 program di bidang kedaruratan 1 program bidang kesiapsiagaan dan 2 program bidang kesekretariatan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi BPBD Provinsi NTB dalam bidang kedaruratan terus dipacu mengingat bahwa Provinsi NTB adalah daerah rawan bencana.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Upaya penanggulangan bencana secara masif dan terencana melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengusaha sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) perlu terus ditingkatkan kemampuannya hingga memiliki makna penting dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*). Guna meningkatkan sinergitas ketiga unsur pelaku penanggulangan bencana tersebut diperlukan suatu gerakan sosialisasi atau kampanye tentang pengurangan risiko bencana yang secara teoritis dan praktis telah dibuktikan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia. Pada tahun 2010 UNISDR (*United Nation International Strategy for Disaster Reduction*) dan organisasi-organisasi mitranya meluncurkan kampanye global bertajuk “Mewujudkan Kota Yang Tangguh – Kotaku Siap Hadapi Bencana! – *Making Cities Resilient – My City Is Getting Ready!*”. Inti dari kampanye ini adalah bagaimana mendorong partisipasi semua pihak dalam mewujudkan tujuan dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam upaya PB menjadi isu strategis dalam penanganan kebencanaan di daerah. Hal ini tentunya dapat terwujud

apabila tersedianya perangkat lunak yang mampu mendorong aksesibilitas kearifan lokal masuk dalam ranah PB seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terkait dengan kebencanaan. Paradigma penanganan bencana bersifat reaktif yaitu bertindak pada saat terjadi bencana telah berubah dengan pengelolaan bencana secara manajerial. Hal ini seiring dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) dari pemerintah pusat. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD saja tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu: Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanggarran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.

Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya. Beberapa rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 tentang Penanggulangan Bencana maka semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi.
2. Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
3. Perlu adanya sinkronisasi peraturan perundangan-undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat.
4. Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel Rancangan awal RKPD dan kebutuhan anggaran Tahun 2016

NO.	URAIAN	RKPD TAHUN 2016	Kebutuhan BPBD TAHUN 2016	Selisih
2.	BELANJA		9.810.994.054	
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.451.113.100	3.584.276.554	133.163.454
	Gelanj Pegawai	3.451.113.100	3.584.276.554	
2.2.	Belanja Langsung	6.226.717.500	6.226.717.500	
	Belanja Pegawai	840.586.500	840.586.500	
	Belanja Barang dan Jasa	5.170.847.600	5.170.847.600	
	Belanja Modal	215.283.400	215.283.400	

Dari rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan Tahun 2016 terdapat selisih, baik dari segi jumlah anggaran maupun program dan kegiatan. Adapun selisih dan perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perubahan dana untuk Belanja Tidak Langsung dalam rancangan awal RKPD dari Rp 3.451.113.100 menjadi Rp 3.584.276.554 disebabkan adanya tambahan penghasilan pegawai yaitu gaji 14
- b. Beberapa penambahan program dari RKPD 2016 karena adanya kebutuhan dalam mendukung kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, pelatihan dan pembentukan TRC PB, optimalisasi TRC pada Penanganan Bencana.
2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kebencanaan; peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2016 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB khususnya di bidang kebencanaan.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi NTB sebagai lembaga teknis daerah dalam penanggulangan bencana mempunyai visi yang selaras dengan arah, tujuan dan sasaran RPJMD 2013 – 2018. Adapun visi yang akan dicapai sebagaimana termuat dalam Renstra Tahun 2013-2018 adalah: “**MEWUJUDKAN MASYARAKAT NTB YANG TANGGUH ADAPTIF BENCANA**”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dibuat misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas pelayanan internal dan data/informasi kebencanaan
2. Memantapkan kecepatan dan ketepatan penanganan bencana;
3. Mempercepat perwujudan kawasan tangguh bencana;
4. Meningkatkan keamanan, keselamatan dan keberlanjutan sarana prasarana.

Adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan PB yang ingin dicapai pada tahun 2016 sebagaimana Renstra BPBD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah seperti pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan PB Tahun 2016

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perlengkapan dan personil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan perlengkapan perkantoran secara manajerial; 2. Terwujudnya pengelolaan personil/kepegawaian secara manajerial.
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel. 2. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif.
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya program yang sinergis, koordinatif, dan responsif. 2. Terwujudnya pelaporan yang transparan dan akuntabel.
4.	Meningkatkan kapasitas dalam pencegahan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemahaman dan keterampilan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dalam upaya pencegahan bencana. 2. Terwujudnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana.
5.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kawasan yang tangguh bencana. 2. Terwujudnya sarana prasarana yang mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana.
6.	Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana yang koordinatif. 2. Terwujudnya pemenuhan bantuan logistik bagi korban bencana.
7.	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana evakuasi dan SDM dalam upaya PB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana yang memadai. 2. Terwujudnya penyelamatan korban bencana secara maksimal.
8.	Meningkatkan kemampuan melakukan rehabilitasi pasca bencana pada wilayah terdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana/prasarana umum yang dapat digunakan kembali oleh korban bencana. 2. Tersedianya tenaga teknis yang mampu melakukan analisa kebutuhan rehabilitasi.
9.	Meningkatkan kemampuan melakukan rekonstruksi pasca bencana pada wilayah terdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana prasarana pemukiman yang lebih baik bagi korban bencana. 2. Tersedianya tenaga teknis yang mampu melakukan analisa kebutuhan rekonstruksi

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas diperlukan program dan kegiatan dengan uraian singkat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini ditujukan untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, koordinasi dan tenaga pendukung lainnya. Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - m. Penyediaan jasa keamanan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembanguna gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pembinaan mental fisik aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
6. Program Siaga Darurat Bencana
 - a. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana
 - b. Penanganan darurat bencana
7. Program Tanggap Darurat Bencana
 - a. Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana
 - b. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD
 - c. Penyusunan rencana kontinjensi
9. Program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana
 - a. Pelatihan tanggap darurat dan evakuasi pemuda pelajar
 - b. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
 - c. Pelatihan kaji cepat darurat bencana
 - d. Workshop peralatan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penangan Penanggulangan Bencana
 - a. Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana
 - b. Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA)
 - c. Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma
11. Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB
 - a. Penerapan penguraangan risiko bencana menuju Desa Tangguh Bencana
 - b. Monitoring dan evaluasi kinerja desa tangguh bencana
12. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
 - a. Pelatihan dan pembentukan TRC PB
 - b. Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informai dan Media Massa Kebencanaan
 - a. Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana

Tabel 3.2 : Program dan Kegiatan Tahun 2016

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1.19.1.19.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.098.467.500	APBD			1.098.467.500
1.19.1.19.3.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya adm surat menyurat	Mataram	1 tahun	9.085.050	APBD		1 tahun	9.085.050
1.19.1.19.3.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi elektronik & sumber daya listrik	Mataram	1 tahun	115.800.000	APBD		1 tahun	115.800.000
1.19.1.19.3.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga adm keuangan	Mataram	1 tahun	86.892.000	APBD		1 tahun	86.892.000
1.19.1.19.3.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan & bahan kebersihan serta tenaga kebersihan	Mataram	1 tahun	72.290.000	APBD		1 tahun	72.290.000
1.19.1.19.3.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Mataram	1 tahun	51.000.050	APBD		1 tahun	51.000.050
1.19.1.19.3.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	Mataram	1 tahun	35.007.500	APBD		1 tahun	35.007.500
1.19.1.19.3.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik	Mataram	1 tahun	45.809.000	APBD		1 tahun	45.809.000
1.19.1.19.3.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan	Mataram	2 paket	226.183.400	APBD		2 paket	226.183.400

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
		perlengkapan kantor							
1.19.1.19.3.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Mataram	1 tahun	10.800.000	APBD		1 tahun	10.800.000
1.19.1.19.3.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	Mataram	1 tahun	78.750.000	APBD		1 tahun	78.750.000
1.19.1.19.3.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas	Mataram	1 tahun	175.130.500	APBD		1 tahun	175.130.500
1.19.1.19.3.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas dalam daerah	Mataram	1 tahun	80.000.000	APBD		1 tahun	80.000.000
1.19.1.19.3.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamana kantor (satpam)	Mataram	7 org	111.720.000	APBD		7 org	111.720.000
1.19.1.19.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.970.125.000	APBD			2.970.125.000
1.19.1.19.3.02.03	Pembangun gedung kantor	Terbangunnya gudang logistic/peralatan	Mataram	1 paket	2.391.590.000	APBD		1 paket	2.391.590.000
1.19.1.19.3.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan roda 2	Mataram	3 unit	60.750.000	APBD		3 unit	60.750.000
1.19.1.19.3.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya	Mataram	1 tahun	66.400.000	APBD		1 tahun	66.400.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
	gedung kantor	gedung kantor							
1.19.1.19.3.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Mataram	27 unit	379.735.000	APBD		27 unit	379.735.000
1.19.1.19.3.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharaan perlengkapan kantor	Mataram	18 unit	45.400.000	APBD		18 unit	45.400.000
1.19.1.19.3.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya sarana kantor secara rutin	NTB	55 unit	26.250.000	APBD		55 unit	26.250.000
1.19.1.19.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				24.637.000	APBD			24.637.000
1.19.1.19.3.05.04	Pembinaan mental fisik aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan	Mataram	2 keg	24.637.000	APBD		2 keg	24.637.000
1.19.1.19.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan				83.120.000	APBD			83.120.000
1.19.1.19.3.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan kinerja SKPD	Mataram	2 dok	31.520.000	APBD		2 dok	31.520.000
1.19.1.19.3.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunya renja SKPD, RKA, RKAP	Mataram	3 dok	51.600.000	APBD		3 dok	51.600.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1.19.1.19.3.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				50.780.000	APBD			50.780.000
1.19.1.19.3.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya pengelolaan asset BPBD	Mataram	1 tahun	50.780.000	APBD		1 tahun	50.780.000
1.19.1.19.3.08	Program Siaga Darurat Bencana				977.444.000	APBD			977.444.000
1.19.1.19.3.08.04	Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana	Tersedianya sarana penampungan air bersih (tendon & kelengkapannya)	NTB	10 paket	830.257.000	APBD		10 paket	830.257.000
1.19.1.19.3.08.05	Penanganan darurat bencana	Terlaksananya keg PB secara koordinatif & TRC	NTB	200 orang	147.187.000	APBD		200 orang	147.187.000
1.19.1.19.3.09	Program Tanggap Darurat Bencana				84.320.000	APBD			84.320.000
1.19.1.19.3.09.01	Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana	Tersedianya lap kajian pelaks kedaruratan	NTB	1 dok	84.320.000	APBD		1 dok	84.320.000
1.19.1.19.3.22	Program Pencegahan Dini				1.196.970.000	APBD			1.196.970.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
	dan Penanggulangan Korban Bencana Alam								
1.19.1.19.3.22.05	Sosialisasi pengurangan risiko bencana	Terselenggaranya Bulan PRB prov.NTB & Nasional	Mataram	2 keg	265.275.000	APBD		2 keg	265.275.000
1.19.1.19.3.22.07	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD	Terlaksanya pelatihan jender dlm PB, rakornis, rakernis, pergub	NTB	4 keg	349.3250.000	APBD		4 keg	349.3250.000
1.19.1.19.3.22.11	Penyusunan rencana kontinjensi	Tersedianya dok renkon	NTB	1 dok	123.250.000	APBD		1 dok	123.250.000
1.19.1.19.3.22.15	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Terbentuk S/M Aman Bencana	NTB	5 sekolah	118.470.000	APBD		5 sekolah	118.470.000
1.19.1.19.3.22.19	Gladi Penanggulangan Bencana	Terlaksanya pelat PB bagi aparat, masy & relawan	NTB	100 org	340.725.000	APBD		100 org	340.725.000
1.19.1.19.3.24	Program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana				606.065.000	APBD			606.065.000
1.19.1.19.3.24.02	Pelatihan tanggap darurat dan evakuasi pemuda pelajar	Jumlah pemuda pelajar yg dilatih	NTB	150 org	149.750.000	APBD		150 org	149.750.000
1.19.1.19.3.24.05	Pemantauan dan penyebarluasan informasi	Data & Informasi	Mataram	1 tahun	138.090.000	APBD		1 tahun	138.090.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
	potensi bencana alam	Bencana Alam							
1.19.1.19.3.24.14	Pelatihan kaji cepat darurat bencana	Jumlah aparat yang dilatih	NTB	55 org	183.525.000	APBD		55 org	183.525.000
1.19.1.19.3.24.15	Workshop peralatan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah org yg mengikuti workshop	Mataram	50 org	134.700.000	APBD		50 org	134.700.000
1.19.1.19.3.25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penangan Penanggulangan Bencana				478.800.000	APBD			478.800.000
1.19.1.19.3.25.02	Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana	Jml Laporan verifikasi	NTB	11 dok	135.750.000	APBD		11 dok	135.750.000
1.19.1.19.3.25.04	Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA)	Jumlah org yang dilatih DaLA	NTB	40 org	243.050.000	APBD		40 org	243.050.000
1.19.1.19.3.25.08	Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma	Jumlah org yg dilatih	NTB	30 org	100.000.000	APBD		30 org	100.000.000
1.19.1.19.3.31	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB				491.764.000	APBD			491.764.000
1.19.1.19.3.31.02	Penerapan pengurangan risiko bencana menuju Desa Tangguh Bencana	Jumlah Destana	NTB	5 desa	461.275.000	APBD		5 desa	461.275.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1.19.1.19.3.31.03	Monitoring dan evaluasi kinerja desa tangguh bencana	Lap Monev	NTB	1 dok	30.489.000	APBD		1 dok	30.489.000
1.19.1.19.3.55	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana				290.400.000	APBD			290.400.000
1.19.1.19.3.55.02	Pelatihan dan pembentukan TRC PB	Jumlah anggota TRC yang dilatih	Mataram	60 org	80.900.000	APBD		60 org	80.900.000
1.19.1.19.3.55.07	Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana	Jml anggota TRC yg dilatih	NTB	10 org	209.500.000	APBD		10 org	209.500.000
1.19.1.19.3.62	Program Pengembangan Komunikasi, Informai dan Media Massa Kebencanaan				73.825.000	APBD			73.825.000
1.19.1.19.3.62.02	Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana	Jumlah aparat yg dilatih	Mataram	50 org	73.825.000	APBD		50 org	73.825.000
TOTAL					8.426.717.500	APBD			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 telah disusun secara optimal mengakomodir berbagai masukan baik dari musrembang maupun disampaikan langsung oleh masyarakat. Selain itu, Renja 2016 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ini semaksimal mungkin dapat melibatkan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana secara terkoordinir.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran Renstra BPBD 2013 – 2018 diharapkan pula mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018. Dengan demikian, maka program dan kegiatan yang telah dibuat dalam Renja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 dapat terakomodir secara maksimal dalam DPA dan RKA BPBD Tahun 2016.

Demikian Rencana Kerja (Rencana Kerja) BPBD disusun dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan disampaikan terima kasih.

Mataram, April 2015

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP
NIP. 19610810 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi	17
	2.3. Isu Penting Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	18
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN SKPD	21
	3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016	21
	3.2. Program dan Kegiatan	23
BAB IV	INDIKATOR KINERJA dan KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBAKANKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD.....	
BAB V	DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF	
BAB VI	SUMBERDANA YANG MEMBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
BAB VII	PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, topografis dan sosiologis termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Dari 14 jenis bencana yang kerap terjadi di Indonesia, 11 diantaranya terjadi di Provinsi NTB. Secara geografis, Provinsi NTB terletak pada lempengan bumi yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) sehingga rentan dengan gempa bumi. Begitu pula dengan kondisi klimatologis yang dapat menimbulkan cuaca ekstrim dan angin puting beliung. Dari segi kondisi topografis yang berbukit-bukit memberi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Selain kondisi alam tersebut, kondisi sosiologis Provinsi NTB yang di satu sisi memberi dampak positif bagi pembangunan daerah namun disisi lain juga sering menimbulkan konflik sosial. Beberapa jenis bencana tersebut memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan konflik antar warga. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada RPJMD 2013-2018 telah menjadikan isu kebencanaan sebagai salah satu urusan penting dalam pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam misi ketujuh

Penanganan kebencanaan secara koordinatif oleh Pemerintah Provinsi NTB terus ditingkatkan sejak terbentuknya BPBD Provinsi NTB tahun 2009 melalui Pergub NTB Nomor 49 Tahun 2009. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penanganan kebencanaan di Provinsi NTB terus menunjukkan kinerja yang baik, bahkan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam penanganan saat terjadi bencana (tanggap darurat) tahun 2012 dan kesiapsiagaan penanganan bencana tahun 2013. Namun demikian, BPBD Provinsi NTB ibarat bayi yang baru tumbuh memerlukan perhatian lebih guna mencapai kondisi yang diinginkan. Untuk itu, Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi NTB pada tahun 2016 perlu dibuat seoptimal mungkin mampu memberi ruang gerak yang maksimal guna terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018.

Hal ini sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan baik rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah maupun rencana tahunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun RKPD yang disusun setiap tahunnya, wajib ditindaklanjuti oleh setiap SKPD dengan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004. Renja SKPD memuat strategi pencapaian kinerja sebagaimana direncanakan dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD dengan memperhatikan RKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Nusa Tenggara Barat tahun 2017 telah disusun dan merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan berdasarkan pertimbangan dan aspirasi yang disampaikan dalam musrenbang. Menindaklanjuti RKPD Provinsi NTB Tahun 2017, BPBD Provinsi NTB menyusun Renja Tahun 2017 sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nusa Tenggara Barat.

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018.
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor .. Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BPBD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan penanganan kebencanaan antar sektor dan wilayah serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPBD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai penjabaran RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017;
2. Terselenggaranya upaya penanggulan bencana yang bersifat koordinatif dan integratif secara optimal;
3. Terselenggaranya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana/*Reduce Risk Disaster* (RAN PRB) di Provinsi NTB;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, menguraikan beberapa sub topik yaitu;

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra;

Review terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Tahun 2014 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2015 (tahun n-1) berdasarkan APBD tahun 2015 dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2013-2018.

Analisis Kinerja Pelayanan Rencana Kerja;

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan yang diukur berdasarkan indikator kinerja baik dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan PP No.6 tahun 2008 dan PP Nomor 38 tahun 2007. Indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi NTB, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

Menguraikan tentang isu-isu terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Provinsi NTB, termasuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai visi dan misi. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan sebagai langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan;

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi baik disampaikan langsung kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN***

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional khususnya kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan isi dari Rencana Strategis Daerah yang didahului dengan analisis. Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat diketahui berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dokumen pertanggung-jawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tahun 2014 dan perkiraan target pencapaian tahun 2015 dan rencana kinerja tahun 2016. Adapun pengukuran Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan dokumen lainnya. Adapun penetapan indikator kinerja sekretariat dan bidang teknis masing-masing sebagai berikut :

A.1. Sekretariat

Indikator kinerja pelayanan BPBD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BPBD pada Sekretariat

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2014	2015
1.	Pelayanan surat menyurat	1 hari	1 hari
2.	Pelayanan kepegawaian	1 hari	1 hari
3.	Pelayanan keuangan	1 hari	1 hari
4.	Pelayanan data dan informasi bencana	1 hari	1 hari

A.2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Gambaran kinerja pelayanan BPBD pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja SKPD pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2014 dan 2015
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana, prasarana dan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana

A.3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Gambaran kinerja pelayanan BPBD pada Bidang Kedaruratan dan Logistik selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja BPBD pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2014 dan 2015
1.	Penanganan keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia
2.	Penanganan Logistik	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (makan, minum dan kesehatan)

A.4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran kinerja pelayanan BPBD pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Capaian Kinerja BPBD pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2014 dan 2015
1.	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik dan non fisik agar dapat berfungsi kembali
2.	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk keperluan analisis terhadap capaian kinerja BPBD Provinsi NTB, data realisasi keuangan dan fisik tahun 2014 dan 2015 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

B.1 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2014

Realisasi keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 4.861.509.057 atau 92,98 persen dan realiasi fisik mencapai 100 persen dengan rincian realisasi program seperti pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2014

No.	Program/Kegiatan	Jml Anggaran Rp.	Rrealisasi			Sisa (Rp.)
			Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	%	
	APBD 2014	5.228.533.500	4.861.509.057	92,98	100	367.024.443
A.	Non Program (BTL)	3.383.102.000	3.091.221.963	91,37	100	291.880.037
B.	PROGRAM DAN KEGIATAN (BL)	1.845.431.500	1.770.287.094	95,93	100	75.144.406
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	733.573.500	705.515.431	96,18	100	28.058.069
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	530.195.000	517.531.263	97,61	100	12.663.737
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.800.000	36.224.000	98,43	100	576.000
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	57.254.000	51.829.950	90,53	100	5.424.050
5.	Program pencegahan dini dan penang-gulangan korban bencana alam	151.775.000	150.811.600	99,37	100	963.400
6.	Program penanganan Tanggap Darurat dan evakuasi/penyelamatan Korban Bencana	310.834.000	283.386.350	91,17	100	27.447.650
7.	Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	25.000.000	24.988.500	99,95	100	11.500

Terdapat dua program dengan tingkat realisasi keuangan dibawah prosentase realisasi keuangan Belanja Langsung yaitu Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (90,53%) dan Program penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/penyelamatan Korban Bencana (91,17%). Adapun penyebab rendahnya realisasi keuangan kedua rogram ini yaitu adanya kesalahan administrasi penetapan jumlah personil penyusun laporan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan lemahnya koordinasi penanganan tanggap darurat bencana pada penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/penyelamatan Korban Bencana.

B.2. Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2015

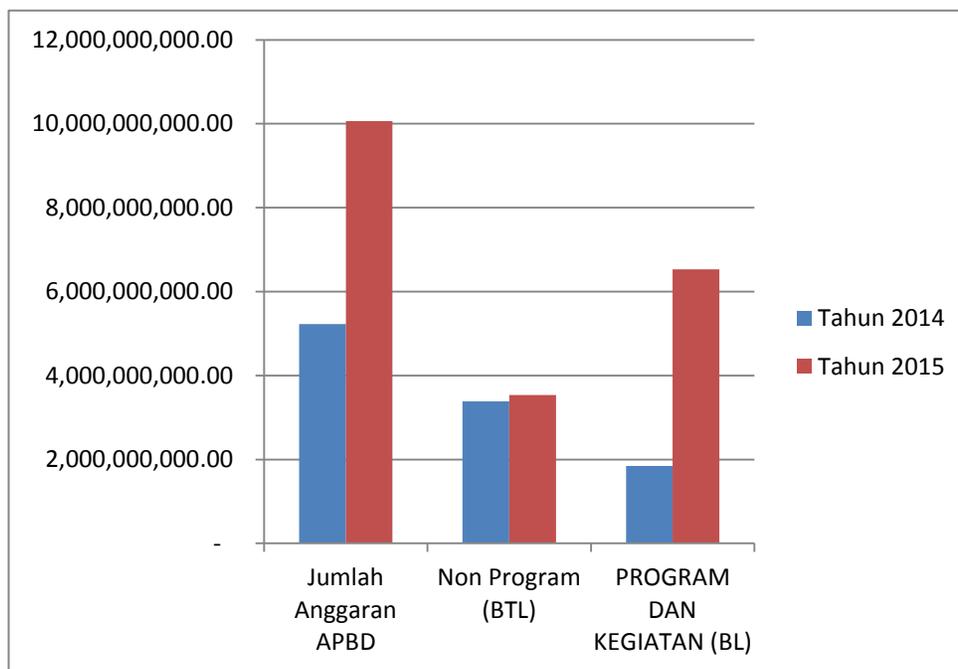
Realisasi keuangan tahun 2015 sampai dengan bulan maret mencapai Rp. 482.209.241 atau 4,79% dari total anggaran Rp. 10.066.502.980. Apabila dirinci berdasarkan jenis belanja maka realisasi keuangan untuk Belanja Langsung baru mencapai Rp. 124.292.161 atau 1,90% dari Rp. 6.532.869.500. Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang mendapatkan alokasi anggaran kas pada triwulan I belum dilaksanakan. Adapun rincian realisasi seperti pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6 Realisasi keuangan sampai dengan bulan Maret 2015

No	Program/Kegiatan	Jml Anggaran Rp.	Rrealisasi		Sisa	
			Keuangan			Fisik
			Rp.	%		%
	APBD 2015	10.066.502.980	482.209.241	4,79		9.584.293.739
A.	Non Program (BTL)	3.533.633.480	357.917.080	10,13		3.175.716.400
B.	PROGRAM DAN KEGIATAN (BL)	6.532.869.500	124,292,161	1.90	0,00	6,408,577,339
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.296.864.000	58,821,260	4.54	0,00	1,238,042,740
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.190.745.500	22,728,001	1.91	0,00	1,168,017,499
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	109.400.000	-	-	0,00	109,400,000
4.	Program Siaga Darurat Bencana	1.171.354.000	-	-	0,00	1,171,354,000
5.	Program Tanggap Darurat Bencana	109.170.000	8,980,000	8.23	0,00	100,190,000
6.	Program Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan	631.832.500	-	-	0,00	631,832,500
7.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	6702.97.500	25,280,000	3.77	0,00	645,017,500
8.	Program penanganan Tanggap Darurat dan evakuasi/penyelamatan Korban Bencana	45.642.000		-	0,00	45,642,000

9.	Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	568520000	4,845,400	0.85	0,00	563,674,600
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	124.319.000		-	0,00	124,319,000
11.	Pengembangan Data /Informasi	43.640.000		-	0,00	43,640,000
12.	Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB	571.085.000	3,637,500	0.64	0,00	567,447,500

B.3. Struktur Anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2015



Gambar 1 : Grafik struktur anggaran tahun 2014 dan 2015

Dari gambar 1 diatas terlihat bahwa struktur anggaran BPBD Provinsi NTB tahun 2014 berubah pada tahun 2015. Pada tahun 2014 nilai Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.383.102.000 atau 64,70% dari total anggaran dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.845.431.500 Atau 35,30%. Pada Tahun 2015, terjadi peningkatan anggaran secara drastis pada Belanja Langsung yaitu Rp. 6.532.869.500 atau 64,90% dari total anggaran sebesar Rp. 10.066.502.980. Dengan adanya peningkatan anggaran ini tentu diharapkan mampu mempercepat pencapaian misi ketujuh Pemerintah Provinsi NTB yaitu “Memulihkan keseimbangan lingkungan dan

menerapkan pembangunan berkelanjutan” dalam rangka pencapaian visi “*Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera*”. Dengan demikian maka fungsi komando dan koordinator dalam penyelenggaraan PB di Provinsi NTB, BPBD Provinsi NTB dapat bekerja secara optimal mulai dari pra bencana, saat bencana sampai pada pasca bencana. Permasalahan tahun 2013 dan 2014 yang menyebabkan fungsi tersebut belum optimal karena rendahnya aksesibilitas informasi kebencanaan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih minimnya kapasitas SDM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik lintas sektor maupun lintas wilayah dapat teratasi pada tahun 2015 ini.

Kinerja BPBD Provinsi NTB dapat lebih komprehensif, sistematis dengan adanya peningkatan program dan kegiatan pada tahun 2015. Untuk itu beberapa strategi dan kebijakan dapat dibuat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan PB sebagaimana termuat dalam Renstra BPBD Provinsi NTB tahun 2013-2018 sebagai berikut :

- a. Mendorong rasa tanggung-jawab aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijakan.
- b. Pengembangan SDM melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur.
- c. Meningkatkan kemampuan teknis aparat.
- d. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
- e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
- f. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- g. Membangun kemampuan dan kolektifitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana.
- h. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.

- i. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- j. Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- k. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan PB di Provinsi NTB dengan arah kebijakan :
 - Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan PB sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB.
 - Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi Pemerintah Kab/Kota dan lintas sektor.

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/D Pebruari 2015 (Tahun Berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Progran & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Masuk/Keluar	1000 surat	200 surat	200 surat	200 surat	100	200 surat	20 surat	10,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik	Terpenuhi nya kebutuhan 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 bulan	8,33
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan R2 yang dipelihara, dan		6 unit	6 unit	6 unit	100	14 unit	0	0
		Jumlah Kendaraan R4 yang dipelihara, dan		19 unit	19 unit	19 unit	100	19 unit	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen laporan keuangan	114 dok	19 dok	19 dok	19 dok	100	19 dok	0	0
		Dokumen laporan Asset dan Barang	54 dok	9 dok	9 dok	9 dok	100	9 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kontrak Clening Service yang dipekerjakan	8 orang/tahun	5 orang	4 orang	4 orang	100	8 orang	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Terpenuhi nya ATK 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 bulan	8,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran, majalah	42 eksp	7 eksp	7 ekspl	7 eksp	100	7 eksp	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat/tamu	2500 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100	500 orang	-	-
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	30 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	30 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga kontrak Satpam yang dipekerjakan	52 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100	10 orang	1 bulan	8,33
1.19 . 1.19.03 . 01 . 27	Rapat Koordinasi Teknis penanggulangan bencana tingkat Provinsi	Dokumen hasil rakornis	12 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 01 . 28	Rapat Kerja Teknis penanggulangan bencana Tingkat Provinsi	Dokumen hasil rakernis	14 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	3 dok	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 01 . 29	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana BPBD Kab/Kota	Dokumen hasil kajian Monev PB	10	dok	1 dok	1 dok	100	2 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Garasi, Pagar Keliling, Gudang, Tempat Ibadah, Gedung PUSDALOPS	5 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	3 paket	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mobil	19 mobil	0	1 mobil	1 mobil	100	3 mobil	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional pertahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Rutin/berkala peralatan kantor pertahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100	0	0	0
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01	Penyusunan Peraturan Gubernur (PERGUB) Kebencanaan (2014)	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100	0	0	0
1.19 . 1.19.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.19 . 1.19.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lakip, Laporan tahunan	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 06 . 05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Renja, Renstra,, RKA/DPA, RKAP/DPAP	16 dok	3 dok	4 dok	4 dok	100	3 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 08	Program Siaga Darurat Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 08 . 02	Geladi Posko dan Geladi Lapang Penanggulangan Bencana	Jml aparaturn dan masyarakat peserta gladi PB	1 kali	0	0	0	0	1 Kali	0	0
1.19 . 1.19.03 . 08 . 04	Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana		4 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 08 . 05	Koordinasi dan konsultasi penanggulangan Bencana		0	0	0	0	0	1 kpts	0	0
1.19 . 1.19.03 . 09	Program Tanggap Darurat Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 09 . 01	Monitoring dan Evaluasi Kedaruratan Bencana	Jml dokumen PB	40 dok	0	0	0	0	10 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 10	Program Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan		0	0	0	0	0			
1.19 . 1.19.03 . 10 . 01	Perbaikan Lingkungan daerah bencana	Tertanganinya korban bencana masa transisi darurat bencana	2 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0
1.19 . 1.19.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam									
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam									
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04	Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya bencana									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05	Kegiatan Tahunan dalam rangka Bulan Pengurangan Resiko Bencana se Dunia	Jumlah personil yg mengikuti PRB	100 orang	7 orang	20 orang	7 orang	35	20 orang	0	0
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi BPBD	Jumlah aparat/masy yg dilatih	60 orang	0	30 orang	30 orang	100	30 orang	0	0
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15	Fasilitasi Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Jumlah sekolah aman bencana	20 sekolah	0	0	0	0	5 sekolah	0	0
1.19 . 1.19.03 . 24	Program penanganan Tanggap Darurat dan evakuasi/penyelamatan Korban Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 24 . 05	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Dokumen hasil pemantauan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	0	0
1.19 . 1.19.03 . 25	Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana									
1.19 . 1.19.03 . 25 . 02	Verifikasi Tingkat Kerusakan Paskabencana	Jumlah dokumen hasil verifikasi	60 dok	4 dok	10 dok	10 dok	100	10 dok	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 25 . 03	Pemberian bahan bantuan bangunan untuk perbaikan rumah masyarakat pasca bencana									
1.19 . 1.19.03 . 25 . 06	Pengadaan Bahan Banjiran	Jml Bronjong	0	0	0	0	0	1000 m3	0	0
		Jml Karung	0	0	0	0	0	10000 lbr	0	0
1.19 . 1.19.03 . 25 . 10	Rapat Koordinasi Teknis pasca rehabilitasi dan rekontruksi	Jml dok rapat	4 dok	0	0	0	0	1 dok	0	0
1.19 . 1.19.03 . 26	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	0	0	0	0	0	0			
1.19 . 1.19.03 . 26 . 01	Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Jml profil	4 profil	0	0	0	0	1 profil	0	0
1.19 . 1.19.03 . 27	Pengembangan Data /Informasi									
1.19 . 1.19.03 . 27 . 02	Pembentukan Sisitem Informasi Geografis (SIG) di Pusdalops	Jml peta informasi	4 peta	0	0	0	0	1 peta	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra SKPD 2013-2018)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2015 (n-1))	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD 2014 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2014 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Progran & Kegiatan s/d tahun berjalan 2015 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1.19 . 1.19.03 . 31	Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB									
1.19 . 1.19.03 . 31 . 02	Fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jml org yg dilatih dan desa tangguh bencana	300 org, 10 desa	0	0	0	0	60 org, 2 desa	0	0
1.19 . 1.19.03 . 31 . 03	Monev Kinerja Desa Tangguh Bencana	Jml dok hasil monev	5 dok	0	0	0	0	1 dok	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi

BPBD Provinsi NTB yang terbentuk sejak tahun 2009 melalui Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yang tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 3 Tahun 2009 yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sejauh mana tugas pokok dan fungsi diatas telah dilaksanakan? Analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dan 2015 dapat memberi gambaran statistik yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan untuk pelaksanaan upaya PB pada tahun berikutnya. Realisasi keuangan tahun 2014 sebesar 92,98% disebabkan oleh anggaran BTL tidak terserap sebesar Rp. 291.80.037 sehingga realisasi keuangan hanya mencapai 91,37% dan serapan BL hanya mencapai 95,93% disebabkan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai pada masing-masing program yang secara keseluruhan sebesar Rp.75.144.406.

Realisasi keuangan terendah terjadi pada program rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan PB yaitu 12,60%. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi penanganan pasca bencana dengan BPBD Kab/Kota di lokasi bencana sehingga kegiatan verifikasi tingkat kerusakan bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya realisasi keuangan pada program penanganan tanggap darurat dan evakuasi/ penyelamatan korban bencana yaitu 78,84% menunjukkan masih lemahnya koordinasi saat tanggap darurat sehingga penanganan bantuan logistik tidak optimal. Program-program dengan sisa anggaran yang cukup besar yaitu program pelayanan administrasi perkantoran (Rp.28.058.069), program penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana (Rp. 27.447.650), dan program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur (Rp. 12.663.737). Penyebab terjadinya sisa anggaran dari ketiga program tersebut sebagai berikut :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran (Rp.28.058.069);
 - Terjadinya efisiensi pada belanja penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sebesar Rp. 11.676.509
 - Terjadinya penghematan pada belanja makan dan minum sebesar Rp. 4.080.000 dan belanja keamanan kantor sebesar Rp. 4.080.000
- b. program penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana (Rp. 27.447.650);
 - Efisiensi belanja pelatihan tanggap darurat dan evakuasi pemuda/pelajar sebesar Rp. 6.990.000;
 - Terjadi kendala waktu dalam belanja siaga darurat bencana kekeringan sebesar Rp. 20.357.100.
- c. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Rp. 12.663.737).
 - Terjadinya efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 11.263.737.

Meskipun realisasi keuangan kurang dari 100%, namun realisasi fisik mencapai 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa pembelanjaan telah dilakukan secara efisien khususnya di bidang kesekretariatan. Namun tidak demikian halnya pada bidang teknis penanganan tanggap darurat bencana kekeringan dimana terjadinya sisa anggaran disebabkan adanya kendala teknis peraturan keuangan. Meskipun pada dasarnya jumlah anggaran tahun 2014 tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2013, tingkat kinerja pelayanan organisasi secara terus menerus ditingkatkan.

Mencermati kinerja pelayanan tahun 2013/2014 yang memperlihatkan adanya peningkatan dan urusan kebencanaan di Provinsi NTB makin meningkat, maka pada tahun 2015 terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan sebesar 92,53% yaitu dari Rp. 5.228.533.500 (2014) menjadi Rp. 10.066.502.980 (2015). Peningkatan alokasi

anggaran tahun 2015 dibarengi dengan penambahan sejumlah program dari tahun sebelumnya yaitu:

- a. Program Siaga Darurat Bencana
- b. Program Tanggap Darurat Bencana
- c. Program Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- e. Pengembangan Data /Informasi
- f. Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB

Terdapat satu program pada tahun 2014 tidak dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dari enam program tambahan tahun 2015 terdapat 4 program di bidang kedaruratan 1 program bidang kesiapsiagaan dan 2 program bidang kesekretariatan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi BPBD Provinsi NTB dalam bidang kedaruratan terus dipacu mengingat bahwa Provinsi NTB adalah daerah rawan bencana.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Upaya penanggulangan bencana secara masif dan terencana melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengusaha sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) perlu terus ditingkatkan kemampuannya hingga memiliki makna penting dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*). Guna meningkatkan sinergitas ketiga unsur pelaku penanggulangan bencana tersebut diperlukan suatu gerakan sosialisasi atau kampanye tentang pengurangan risiko bencana yang secara teoritis dan praktis telah dibuktikan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia. Pada tahun 2010 UNISDR (*United Nation International Strategy for Disaster Reduction*) dan organisasi-organisasi mitranya meluncurkan kampanye global bertajuk “Mewujudkan Kota Yang Tangguh – Kotaku Siap Hadapi Bencana! – *Making Cities Resilient – My City Is Getting Ready!*”. Inti dari kampanye ini adalah bagaimana mendorong partisipasi semua pihak dalam mewujudkan tujuan dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam upaya PB menjadi isu strategis dalam penanganan kebencanaan di daerah. Hal ini tentunya dapat terwujud

apabila tersedianya perangkat lunak yang mampu mendorong aksesibilitas kearifan lokal masuk dalam ranah PB seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terkait dengan kebencanaan. Paradigma penanganan bencana bersifat reaktif yaitu bertindak pada saat terjadi bencana telah berubah dengan pengelolaan bencana secara manajerial. Hal ini seiring dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) dari pemerintah pusat. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD saja tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu: Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.

Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya. Beberapa rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 tentang Penanggulangan Bencana maka semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi.
2. Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
3. Perlu adanya sinkronisasi peraturan perundangan-undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat.
4. Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel Rancangan awal RKPD dan kebutuhan anggaran Tahun 2016

NO.	URAIAN	RKPD TAHUN 2016	Kebutuhan BPBD TAHUN 2016	Selisih
2.	BELANJA		9.810.994.054	
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.451.113.100	3.584.276.554	133.163.454
	Gelanj Pegawai	3.451.113.100	3.584.276.554	
2.2.	Belanja Langsung	6.226.717.500	6.226.717.500	
	Belanja Pegawai	840.586.500	840.586.500	
	Belanja Barang dan Jasa	5.170.847.600	5.170.847.600	
	Belanja Modal	215.283.400	215.283.400	

Dari rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan Tahun 2016 terdapat selisih, baik dari segi jumlah anggaran maupun program dan kegiatan. Adapun selisih dan perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perubahan dana untuk Belanja Tidak Langsung dalam rancangan awal RKPD dari Rp 3.451.113.100 menjadi Rp 3.584.276.554 disebabkan adanya tambahan penghasilan pegawai yaitu gaji 14
- b. Beberapa penambahan program dari RKPD 2016 karena adanya kebutuhan dalam mendukung kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, pelatihan dan pembentukan TRC PB, optimalisasi TRC pada Penanganan Bencana.
2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kebencanaan; peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2016 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB khususnya di bidang kebencanaan.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Provinsi NTB sebagai lembaga teknis daerah dalam penanggulangan bencana mempunyai visi yang selaras dengan arah, tujuan dan sasaran RPJMD 2013 – 2018. Adapun visi yang akan dicapai sebagaimana termuat dalam Renstra Tahun 2013-2018 adalah: “**MEWUJUDKAN MASYARAKAT NTB YANG TANGGUH ADAPTIF BENCANA**”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dibuat misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas pelayanan internal dan data/informasi kebencanaan
2. Memantapkan kecepatan dan ketepatan penanganan bencana;
3. Mempercepat perwujudan kawasan tangguh bencana;
4. Meningkatkan keamanan, keselamatan dan keberlanjutan sarana prasarana.

Adapun tujuan dan sasaran penyelenggaraan PB yang ingin dicapai pada tahun 2016 sebagaimana Renstra BPBD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah seperti pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan PB Tahun 2016

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perlengkapan dan personil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan perlengkapan perkantoran secara manajerial; 2. Terwujudnya pengelolaan personil/kepegawaian secara manajerial.
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel. 2. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif.
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya program yang sinergis, koordinatif, dan responsif. 2. Terwujudnya pelaporan yang transparan dan akuntabel.
4.	Meningkatkan kapasitas dalam pencegahan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemahaman dan keterampilan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dalam upaya pencegahan bencana. 2. Terwujudnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana.
5.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kawasan yang tangguh bencana. 2. Terwujudnya sarana prasarana yang mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana.
6.	Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana yang koordinatif. 2. Terwujudnya pemenuhan bantuan logistik bagi korban bencana.
7.	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana evakuasi dan SDM dalam upaya PB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana yang memadai. 2. Terwujudnya penyelamatan korban bencana secara maksimal.
8.	Meningkatkan kemampuan melakukan rehabilitasi pasca bencana pada wilayah terdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana/prasarana umum yang dapat digunakan kembali oleh korban bencana. 2. Tersedianya tenaga teknis yang mampu melakukan analisa kebutuhan rehabilitasi.
9.	Meningkatkan kemampuan melakukan rekonstruksi pasca bencana pada wilayah terdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana prasarana pemukiman yang lebih baik bagi korban bencana. 2. Tersedianya tenaga teknis yang mampu melakukan analisa kebutuhan rekonstruksi

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas diperlukan program dan kegiatan dengan uraian singkat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini ditujukan untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, koordinasi dan tenaga pendukung lainnya. Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - m. Penyediaan jasa keamanan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembanguna gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pembinaan mental fisik aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
6. Program Siaga Darurat Bencana
 - a. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana
 - b. Penanganan darurat bencana
7. Program Tanggap Darurat Bencana
 - a. Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - a. Sosialisasi pengurangan risiko bencana
 - b. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD
 - c. Penyusunan rencana kontinjensi
9. Program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana
 - a. Pelatihan tanggap darurat dan evakuasi pemuda pelajar
 - b. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
 - c. Pelatihan kaji cepat darurat bencana
 - d. Workshop peralatan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penangan Penanggulangan Bencana
 - a. Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana
 - b. Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA)
 - c. Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma
11. Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB
 - a. Penerapan penguraangan risiko bencana menuju Desa Tangguh Bencana
 - b. Monitoring dan evaluasi kinerja desa tangguh bencana
12. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
 - a. Pelatihan dan pembentukan TRC PB
 - b. Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informai dan Media Massa Kebencanaan
 - a. Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana

Tabel 3.2 : Program dan Kegiatan Tahun 2016

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1.19.1.19.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.098.467.500	APBD			1.098.467.500
1.19.1.19.3.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya adm surat menyurat	Mataram	1 tahun	9.085.050	APBD		1 tahun	9.085.050
1.19.1.19.3.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi elektronik & sumber daya listrik	Mataram	1 tahun	115.800.000	APBD		1 tahun	115.800.000
1.19.1.19.3.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga adm keuangan	Mataram	1 tahun	86.892.000	APBD		1 tahun	86.892.000
1.19.1.19.3.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan & bahan kebersihan serta tenaga kebersihan	Mataram	1 tahun	72.290.000	APBD		1 tahun	72.290.000
1.19.1.19.3.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Mataram	1 tahun	51.000.050	APBD		1 tahun	51.000.050
1.19.1.19.3.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	Mataram	1 tahun	35.007.500	APBD		1 tahun	35.007.500
1.19.1.19.3.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik	Mataram	1 tahun	45.809.000	APBD		1 tahun	45.809.000
1.19.1.19.3.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan	Mataram	2 paket	226.183.400	APBD		2 paket	226.183.400

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
		perlengkapan kantor							
1.19.1.19.3.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Mataram	1 tahun	10.800.000	APBD		1 tahun	10.800.000
1.19.1.19.3.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	Mataram	1 tahun	78.750.000	APBD		1 tahun	78.750.000
1.19.1.19.3.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas	Mataram	1 tahun	175.130.500	APBD		1 tahun	175.130.500
1.19.1.19.3.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalan dinas dalam daerah	Mataram	1 tahun	80.000.000	APBD		1 tahun	80.000.000
1.19.1.19.3.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamana kantor (satpam)	Mataram	7 org	111.720.000	APBD		7 org	111.720.000
1.19.1.19.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.970.125.000	APBD			2.970.125.000
1.19.1.19.3.02.03	Pembangun gedung kantor	Terbangunnya gudang logistic/peralatan	Mataram	1 paket	2.391.590.000	APBD		1 paket	2.391.590.000
1.19.1.19.3.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan roda 2	Mataram	3 unit	60.750.000	APBD		3 unit	60.750.000
1.19.1.19.3.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya	Mataram	1 tahun	66.400.000	APBD		1 tahun	66.400.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
	gedung kantor	gedung kantor							
1.19.1.19.3.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Mataram	27 unit	379.735.000	APBD		27 unit	379.735.000
1.19.1.19.3.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharaan perlengkapan kantor	Mataram	18 unit	45.400.000	APBD		18 unit	45.400.000
1.19.1.19.3.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya sarana kantor secara rutin	NTB	55 unit	26.250.000	APBD		55 unit	26.250.000
1.19.1.19.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				24.637.000	APBD			24.637.000
1.19.1.19.3.05.04	Pembinaan mental fisik aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan	Mataram	2 keg	24.637.000	APBD		2 keg	24.637.000
1.19.1.19.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan				83.120.000	APBD			83.120.000
1.19.1.19.3.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan kinerja SKPD	Mataram	2 dok	31.520.000	APBD		2 dok	31.520.000
1.19.1.19.3.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunya renja SKPD, RKA, RKAP	Mataram	3 dok	51.600.000	APBD		3 dok	51.600.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1.19.1.19.3.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah				50.780.000	APBD			50.780.000
1.19.1.19.3.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya pengelolaan asset BPBD	Mataram	1 tahun	50.780.000	APBD		1 tahun	50.780.000
1.19.1.19.3.08	Program Siaga Darurat Bencana				977.444.000	APBD			977.444.000
1.19.1.19.3.08.04	Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana	Tersedianya sarana penampungan air bersih (tendon & kelengkapannya)	NTB	10 paket	830.257.000	APBD		10 paket	830.257.000
1.19.1.19.3.08.05	Penanganan darurat bencana	Terlaksananya keg PB secara koordinatif & TRC	NTB	200 orang	147.187.000	APBD		200 orang	147.187.000
1.19.1.19.3.09	Program Tanggap Darurat Bencana				84.320.000	APBD			84.320.000
1.19.1.19.3.09.01	Monitoring dan evaluasi kedaruratan bencana	Tersedianya lap kajian pelaks kedaruratan	NTB	1 dok	84.320.000	APBD		1 dok	84.320.000
1.19.1.19.3.22	Program Pencegahan Dini				1.196.970.000	APBD			1.196.970.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
	dan Penanggulangan Korban Bencana Alam								
1.19.1.19.3.22.05	Sosialisasi pengurangan risiko bencana	Terselenggaranya Bulan PRB prov.NTB & Nasional	Mataram	2 keg	265.275.000	APBD		2 keg	265.275.000
1.19.1.19.3.22.07	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD	Terlaksanya pelatihan jender dlm PB, rakornis, rakernis, pergub	NTB	4 keg	349.3250.000	APBD		4 keg	349.3250.000
1.19.1.19.3.22.11	Penyusunan rencana kontinjensi	Tersedinya dok renkon	NTB	1 dok	123.250.000	APBD		1 dok	123.250.000
1.19.1.19.3.22.15	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Terbentuk S/M Aman Bencana	NTB	5 sekolah	118.470.000	APBD		5 sekolah	118.470.000
1.19.1.19.3.22.19	Gladi Penanggulangan Bencana	Terlaksanya pelat PB bagi aparat, masy & relawan	NTB	100 org	340.725.000	APBD		100 org	340.725.000
1.19.1.19.3.24	Program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana				606.065.000	APBD			606.065.000
1.19.1.19.3.24.02	Pelatihan tanggap darurat dan evakuasi pemuda pelajar	Jumlah pemuda pelajar yg dilatih	NTB	150 org	149.750.000	APBD		150 org	149.750.000
1.19.1.19.3.24.05	Pemantauan dan penyebarluasan informasi	Data & Informasi	Mataram	1 tahun	138.090.000	APBD		1 tahun	138.090.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
	potensi bencana alam	Bencana Alam							
1.19.1.19.3.24.14	Pelatihan kaji cepat darurat bencana	Jumlah aparat yang dilatih	NTB	55 org	183.525.000	APBD		55 org	183.525.000
1.19.1.19.3.24.15	Workshop peralatan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah org yg mengikuti workshop	Mataram	50 org	134.700.000	APBD		50 org	134.700.000
1.19.1.19.3.25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penangan Penanggulangan Bencana				478.800.000	APBD			478.800.000
1.19.1.19.3.25.02	Verifikasi tingkat kerusakan pascabencana	Jml Laporan verifikasi	NTB	11 dok	135.750.000	APBD		11 dok	135.750.000
1.19.1.19.3.25.04	Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (DaLA)	Jumlah org yang dilatih DaLA	NTB	40 org	243.050.000	APBD		40 org	243.050.000
1.19.1.19.3.25.08	Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma	Jumlah org yg dilatih	NTB	30 org	100.000.000	APBD		30 org	100.000.000
1.19.1.19.3.31	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat Dalam PRB				491.764.000	APBD			491.764.000
1.19.1.19.3.31.02	Penerapan pengurangan risiko bencana menuju Desa Tangguh Bencana	Jumlah Destana	NTB	5 desa	461.275.000	APBD		5 desa	461.275.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Iindikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1.19.1.19.3.31.03	Monitoring dan evaluasi kinerja desa tangguh bencana	Lap Monev	NTB	1 dok	30.489.000	APBD		1 dok	30.489.000
1.19.1.19.3.55	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana				290.400.000	APBD			290.400.000
1.19.1.19.3.55.02	Pelatihan dan pembentukan TRC PB	Jumlah anggota TRC yang dilatih	Mataram	60 org	80.900.000	APBD		60 org	80.900.000
1.19.1.19.3.55.07	Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana	Jml anggota TRC yg dilatih	NTB	10 org	209.500.000	APBD		10 org	209.500.000
1.19.1.19.3.62	Program Pengembangan Komunikasi, Informai dan Media Massa Kebencanaan				73.825.000	APBD			73.825.000
1.19.1.19.3.62.02	Peningkatan dan pengembangan komunikasi dan informasi bencana	Jumlah aparat yg dilatih	Mataram	50 org	73.825.000	APBD		50 org	73.825.000
TOTAL					8.426.717.500	APBD			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 telah disusun secara optimal mengakomodir berbagai masukan baik dari musrembang maupun disampaikan langsung oleh masyarakat. Selain itu, Renja 2016 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ini semaksimal mungkin dapat melibatkan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana secara terkoordinir.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran Renstra BPBD 2013 – 2018 diharapkan pula mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018. Dengan demikian, maka program dan kegiatan yang telah dibuat dalam Renja BPBD Provinsi NTB Tahun 2016 dapat terakomodir secara maksimal dalam DPA dan RKA BPBD Tahun 2016.

Demikian Rencana Kerja (Rencana Kerja) BPBD disusun dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan disampaikan terima kasih.

Mataram, April 2015

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP
NIP. 19610810 199003 1 011

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana		target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Perencanaan Pembangun Daerah Rawan Bencana				190.000.000		-		190.000.000
	Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB		1 dok	75.000.000	APBD	-	1 dok	75.000.000
	Kerjasama Pemerintah/LSM dalam upaya penanggulangan b	Nota Kesepakatan dan Kesepahaman (MoU) dalam penanggulangan bencana		5 MoU	15.000.000	APBD	-	5 MoU	15.000.000
	Penyusunan rencana aksi Daerah penanggulangan bencana	Dokumen Rencana Aksi Daerah penanggulangan bencana (RAD-PB)		1 dok	100.000.000	APBD	-	1 dok	100.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.582.000.000		-		1.582.000.000
	Rapat Koordinasi Teknis penanggulangan bencana tingkat P	Dokumen hasil rakornis		2 dok	75.000.000	APBD	-	2 dok	75.000.000
	Rapat Kerja Teknis penanggulangan bencana Tingkat Provin	Dokumen hasil rakernis		3 dok	25.000.000	APBD	-	3 dok	25.000.000
	Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana	Dokumen hasil kajian Monev PB		2 dok	25.000.000	APBD	-	2 dok	25.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Masuk/Keluar		300 surat	12.000.000	APBD	-	300 surat	12.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik		1 Tahun	100.000.000	APBD	-	1 Tahun	100.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dina	Jumlah Kendaraan R2 yang dipelihara, dan		14 unit	305.000.000	APBD	-	14 unit	305.000.000
		Jumlah Kendaraan R4 yang dipelihara, dan		19 unit			-	19 unit	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen laporan keuangan		19 dok	70.000.000	APBD	-	19 dok	70.000.000
		Dokumen laporan Asset dan Barang		9 dok			-	9 dok	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga kontrak Clening Service yang dipekerjakan		6 orang	105.000.000	APBD	-	6 orang	105.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK		1 tahun	50.000.000	APBD	-	1 tahun	50.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	15.000.000	APBD	-	1 tahun	15.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	150.000.000	APBD	-	1 tahun	150.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Jumlah Koran, majalah		7 eksp	10.000.000	APBD	-	7 eksp	10.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat/tamu		500 orang	50.000.000	APBD	-	500 orang	50.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi		5 dok	300.000.000	APBD	-	5 dok	300.000.000
	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi		5 dok	150.000.000	APBD	-	5 dok	150.000.000
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga kontrak Satpam yang dipekerjakan		10 orang	140.000.000	APBD	-	10 orang	140.000.000
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100.000.000		-		100.000.000
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi keua	Lakip, Laporan tahunan		2 dok	30.000.000	APBD	-	2 dok	30.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja	Renja, Renstra,, RKA/DPA, RKAP/DPAP		3 dok	70.000.000	APBD	-	3 dok	70.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.590.000.000		-		1.590.000.000
	Pembangunan Gedung Kantor	Garasi, Pagar Keliling, Gudang, Tempat Ibadah, Gedung Pusdalops		1 paket	.000.000.000	APBD	-	1 paket	.000.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Motor		4 unit	100.000.000	APBD	-	4 unit	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Gedung		1 tahun	50.000.000	APBD	-	1 tahun	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		1 tahun	400.000.000	APBD	-	1 tahun	400.000.000
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Rutin/berkala peralatan kantor		1 tahun	40.000.000	APBD	-	1 tahun	40.000.000
	Program Pengembangan Data/Informasi				350.000.000		-		350.000.000
	Penyusunan Bulletin triwulanan kebencanaan	Bulletin		2000 eksp	100.000.000	APBD	-	2000 eksp	100.000.000
	Pembentukan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Pusdalop	Dokumen/peta Informasi Geografis Kebencanaan			250.000.000	APBD	-		250.000.000
	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa				125.000.000		-		125.000.000
	Revitalisasi komunikasi tanggap bencana	Sarana prasarana komunikasi		1 paket	75.000.000	APBD	-	1 paket	75.000.000
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan	Dokumen rencana dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi bencana		1 dok	50.000.000	APBD	-	1 dok	50.000.000
							-		
1.19.1.19.3.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana				840.000.000		-		840.000.000
	Pengadaan peralatan Satgas PB	Jumlah peralatan satgas PB		1 paket	100.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
	Pembentukan Satuan Reaksi Cepat (SRC)	SRC yang dibentuk		1 kpts	30.000.000	APBD	-	1 kpts	30.000.000
	Inventarisasi/evaluasi Sarana Prasarana PB	Data inventarisasi sarana prasarana PB		1 dok	30.000.000	APBD	-	1 dok	30.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk korban	Petunjuk Jalur Evakuasi		50 buah	100.000.000	APBD	-	50 buah	100.000.000

Sosialisasi Peraturan Per-UU-an tentang PB	Jumlah Aparatur dan Masyarakat Peserta Sosialisasi		50 orang	30.000.000	APBD	-	50 orang	30.000.000
Geladi PB	Jumlah aparaturn dan Masyarakat Peserta Gladi PB		400 orang	400.000.000	APBD	-	400 orang	400.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Bulan PRB Tk Provinsi	Jumlah aparaturn, Relawan Peserta Penyelenggaraan Bulan PRB		200 orang	150.000.000	APBD	-	200 orang	150.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Bulan PRB sedunia	Aparatur, Relawan Peserta Penyelenggaraan Bulan PRB		200 orang	100.000.000	APBD	-	200 orang	100.000.000
Program Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahan bencana				1.425.000.000		-		1.425.000.000
Fasilitasi Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Sekolah aman bencana (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (30 Sekolah/ Madrasah) 10 Kab/Kota)		5 sekolah	100.000.000	APBD	-	5 sekolah	100.000.000
Pembentukan Forum PRB	Forum PRB yang dibentuk		1 unit	25.000.000	APBD	-	1 unit	25.000.000
Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Aparatur, Masyarakat dan dunia usaha yang dilatih		50 orang	100.000.000	APBD	-	50 orang	100.000.000
Diklat unit penanganan psikososial (sarana dan prasarana)	Aparatur dan Relawan yang dilatih		40 orang	100.000.000	APBD	-	40 orang	100.000.000
Kegiatan fasilitasi operasional satgas/tim reaksi cepat	Jumlah aparaturn dan Relawan yang dilatih		3 orang	125.000.000	APBD	-	3 orang	125.000.000
Pelatihan dan Pembentukan TRC PB	Aparatur dan Relawan yang dilatih		5 orang	100.000.000	APBD	-	5 orang	100.000.000
Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana	Aparatur dan Relawan yang dilatih		100 orang	75.000.000	APBD	-	100 orang	75.000.000
Pelatihan SAR bagi anggota TRC	Aparatur dan Relawan yang dilatih		50 orang	150.000.000	APBD	-	50 orang	150.000.000
Penyusunan SOP penyelenggaraan penanggulangan bencana	Dokumen SOP penyelenggaraan penanggulangan bencana		1 dok	75.000.000	APBD	-	1 dok	75.000.000
Bimbingan teknis manajemen dasar penanggulangan bencana	Aparatur dan Relawan yang dilatih		40 orang	150.000.000	APBD	-	40 orang	150.000.000
Bimbingan teknis Satgas PB spesialisasi assetment	Aparatur dan Relawan yang dilatih		30 orang	75.000.000	APBD	-	30 orang	75.000.000
Bimbingan teknis Satgas PB spesialisasi medical action	Aparatur dan Relawan yang dilatih		30 orang	100.000.000	APBD	-	30 orang	100.000.000
Bimbingan teknis pengelolaan bantuan bencana	Aparatur dan Relawan yang dilatih		30 orang	100.000.000	APBD	-	30 orang	100.000.000
Pendidikan dan pelatihan manajemen dasar penanggulangan bencana	Aparatur yang dilatih		30 orang	100.000.000	APBD	-	30 orang	100.000.000
Pembinaan kelinmasan dalam penanggulangan bencana	Aparatur dan Relawan yang dilatih		30 orang	50.000.000	APBD	-	30 orang	50.000.000
Program Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB				470.000.000		-		470.000.000
Kajian Ulang Risiko Bencana	Dokumen Kajian Ulang Risiko bencana Kab/Kota		1 dok	50.000.000	APBD	-	1 dok	50.000.000
Fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana	Masyarakat yang dilatih PRBBK		60 orang	300.000.000	APBD	-	60 orang	300.000.000
	Desa tangguh yang dibentuk		2 desa			-	2 desa	
Monev Kinerja Desa Tangguh Bencana	Dokumen kinerja desa tangguh bencana		1 dok	20.000.000	APBD	-	1 dok	20.000.000
Fasilitasi Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Aparatur yang dilatih		40 orang	100.000.000	APBD	-	40 orang	100.000.000
Program Peningkatan kapasitas SDM				450.000.000		-		450.000.000
Bimbingan teknis Satgas PB spesialisasi Kesiapsiagaan bencana	Aparatur dan Relawan yang dilatih		30 orang	50.000.000	APBD	-	30 orang	50.000.000
Pelatihan Tanggap darurat dan evakuasi pemuda pelajar	Pemuda/pelajar yang dilatih		40 orang	400.000.000	APBD	-	40 orang	400.000.000
Program Penanganan Darurat dan Evakuasi/ Penyelamatan Korban bencana				1.200.000.000		-		1.200.000.000
Pelatihan Manajemen Logistik Pergudangan & Peralatan	Aparatur yang dilatih		40 orang	75.000.000	APBD	-	40 orang	75.000.000
Fasilitasi Gudang Logistik & Peralatan	Logistik dan peralatan yang diadakan		1 paket	1.000.000.000	APBD	-	1 paket	1.000.000.000
Monitoring dan evaluasi Kedaruratan Bencana	Dokumen/laporan kedaruratan bencana		4 dok	25.000.000	APBD	-	4 dok	25.000.000
Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana alam	Dokumen hasil Pemantauan		1 paket	100.000.000	APBD	-	1 paket	100.000.000
Program Siaga Darurat Bencana				830.000.000		-		830.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Bencana	Dokumen PB		1 dok	130.000.000	APBD	-	1 dok	130.000.000
Penyediaan dan penyimpanan bahan , barang dan peralatan	Tanggap bencana		1 paket	700.000.000	APBD	-	1 paket	700.000.000
Program Tanggap Darurat Bencana				1.000.000.000		-		1.000.000.000
Monitorin dan Evaluasi penanganan bencana	Dokumen Penanganan bencana		10 dok	100.000.000	APBD	-		
penyelamatan dan evakuasi masyrakat yang terkena bencana	Tertangani korban bencana saat darurat bencana		1 paket	900.000.000	APBD	-		
Prpgram Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi				690.000.000		-		
Pelatihan tentang Penilaian kerusakan dan kerugian dampak	Aparatur yang dilatih		40 orang	100.000.000	APBD	-		
Kajian kebutuhan pasca bencana	Dokumen Kajian kebutuhan pasca bencana (DaLA dan HRNA)		2 dok	50.000.000	APBD	-		
Pengadaan bahan banjiran	Jumlah Bronjong		1000 m3	150.000.000	APBD	-		
	Karung		1000 lbr			-		
Fasilitasi Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma	Aparat dan Relawan yang di latih		200 orang	75.000.000	APBD	-		
Verifikasi Tingkat Kerusakan Bencana	Dokumen verifikasi		10 dok	65.000.000	APBD	-		
Rapat Koordinasi tehnis pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen Evaluasi pasca rehabilitasi dan rekontruksi		1 dok	75.000.000	APBD	-		
Pemulihan ekonomi produktif masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya usaha ekonomi bagi masyarakat terdampak		4 paket	100.000.000	APBD	-		
Bimbingan Teknis Program RR	Aparatur Kab/Kota yg dilatih		10 kab/kota	50.000.000	APBD	-		
Penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen perencanaan RR		1 dok	25.000.000	APBD	-		
JUMLAH				10.702.000.000		-		

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN		LOKASI	NILAI (Rp. 000)						SUMBER DANA	KET
				TOLOK UKUR	TARGET PENCAPAIAN		2016				2015/2017			
	APBD PROV						APBN		TAHUN	NILAI				
	JENIS	NILAI					JENIS	NILAI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Progran Perencanaan Pembangun Daerah Rawan Bencana	Terwujudnya upaya PB yang efektif, efisien dan tepat sasaran				BL	190,000			2015 2017	-	APBD	
		Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Tersedianya sarana informasi kebencanaan daerah secara periodik.	Tersedianya Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	1 dok	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	43640 50000	APBD	
		Kerjasama Pemerintah/LSM dalam upaya penanggulangan bencana (prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana)	Terwujudnya kerja sama kelembagaan dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya kesepakatan dan kesepahaman dengan lembaga non pemerintah dalam penanggulangan bencana	5 MoU	Provinsi	BL	15,000			2015 2017	0 15000	APBD	
		Penyusunan rencana aksi Daerah penanggulangan bencana (RAD-PB)	Terwujudnya kesatuan langkah dalam PB	Jumlah dokumen rencana aksi Daerah penanggulangan bencana (RAD-PB)	1 dok	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 125000	APBD	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional kantor				BL	1,582,000			2015 2017	-	APBD	
		Rapat Koordinasi Teknis penanggulangan bencana tingkat Provinsi	Terwujudnya kondisi penanggulangan bencana daerah yang koordinatif	Terjalinya sinkronisasi kegiatan antar SKPD Provinsi	2 dok	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	125.718 150.000	APBD	
		Rapat Kerja Teknis penanggulangan bencana Tingkat Provinsi	Terwujudnya kondisi penanggulangan bencana daerah yang koordinatif	Terjalinya koordinasi kegiatan dengan BPBD Kab/Kota	3 dok	Provinsi	BL	25,000			2015 2017	34.795 50.000	APBD	
		Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana BPBD Kab/Kota	Tersedianya informasi dan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	Tersedianya Laporan Monev	2 dok	Provinsi	BL	25,000			2015 2017	35,605 35,000	APBD	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan	Tersedianya jasa surat menyurat	300 surat	Provinsi	BL	12,000			2015 2017	45.560 50.000	APBD	
		Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Terwujudnya aksesibilitas perkantoran	Tersedianya jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	108,100 120,000	APBD	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya mobilitas operasional lembaga	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33 unit	Provinsi	BL	305,000			2015 2017	193,000 305,000	APBD	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya tata kelola administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	28 dok	Provinsi	BL	70,000			2015 2017	70,160 90.000	APBD	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kondisi kerja yang nyaman	Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 orang	Provinsi	BL	105,000			2015 2017	83.145 70.000	APBD	

		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya peralatan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	40.711 50.000	APBD	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya duplikasi dokumen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Provinsi	BL	15,000			2015 2017	30.595 35.000	APBD	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Provinsi	BL	150,000			2015 2017	188.900 200.000	APBD	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbinanya pengembangan wawasan personil/ pegawai dalam bekerja	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 eksp	Provinsi	BL	10,000			2015 2017	9.600 10.000	APBD	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya kesegaran dan vitalitas bekerja	Tersedianya makanan dan minuman	500 orang	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	37.100 40.000	APBD	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana prasarana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 dok	Provinsi	BL	300,000			2015 2017	122.314 150.000	APBD	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya sarana prasarana koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	5 dok	Provinsi	BL	150,000			2015 2017	61.000 100.000	APBD	
		Penyediaan jasa keamanan kantor	Terwujudnya kondusifitas dan keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	10 orang	Provinsi	BL	140,000			2015 2017	109.200 140.000	APBD	
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				BL	100,000			2015 2017	-	APBD	
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi keuangan	Tesusunnya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi keuangan	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi keuangan	2 dok	Provinsi	BL	30,000			2015 2017	31.520 35.000	APBD	
		Penyusunan Rencana Kerja	Tesusunnya rencana kerja tahunan	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan	3 dok	Provinsi	BL	70,000			2015 2017	77.880 80.000	APBD	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai				BL	1,590,000			2015 2017	-	APBD	
		Pembangunan Gedung Kantor	Terwujudnya ruang kerja yang memadai	Tersedianya Gedung Kantor	1 paket	Provinsi	BL	1,000,000			2015 2017	694.508 1.000.000	APBD	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya jumlah sarana kendaraan yang dibutuhkan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	151.350 100.000	APBD	
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Terwujudnya sarana prasarana gedung kantor yang nyaman	Terpeliharanya gedung Kantor secara rutin	1 tahun	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	95.000 40.000	APBD	
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya sarana kendaraan yang siap pakai	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin	1 tahun	Provinsi	BL	400,000			2015 2017	218.887 400.000	APBD	
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	Terwujudnya peralatan kantor yang siap pakai	Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin	1 tahun	Provinsi	BL	40,000			2015 2017	31.000 50.000	APBD	
		Program Pengembangan Data/Informasi					BL	350,000			2015 2017	-	APBD	
		Penyusunan Bulletin triwulanan kebencanaan	tersedianya data/informasi kawasan rawan bencana yang akurat di masing-masing kab/kota	Tersusunnya informasi kebencanaan	2000 eksp	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Pembentukan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Pusdalop	Tersedianya sistem informasi kebencanaan secara digital	Terbentuknya Sistem Informasi Geografis Kebencanaan	1 dok	Provinsi	BL	250,000			2015 2017	43.460 250.000	APBD	

		Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Terwujudnya jejaring komunikasi dan informasi dalam Penanggulangan bencana				BL	125,000			2015 2017	-	APBD	
		Revitalisasi komunikasi tanggap bencana	Terbinanya sumber daya komunikasi dan informasi secara berkesinambungan	Tersedianya sarana komunikasi tanggap darurat yang kapabel	1 paket	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi bencana	terwujudnya rencana dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi bencana	Tersedianya rencana pengembangan informasi bencana	1 dok	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Tercegah semakin meningkatnya risiko bencana				BL	940,000			2015 2017	-	APBD	
		Pengadaan peralatan Satgas PB	Terwujudnya kebutuhan peralatan bagi satuan tugas PB	Tersedianya peralatan satgas	1 paket	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Pembentukan Satuan Reaksi Cepat (SRC)	Terwujudnya kondisi penanganan tanggap darurat bencana secara terpadu	Terbentuknya organisasi penanggulangan bencana	1 kpts	Provinsi	BL	30,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Inventarisasi/evaluasi Sarana Prasarana PB	Termonitornya kondisi sarana prasarana PB	Tersedianya informasi tentang kondisi sarana prasarana PB	1 dok	Provinsi	BL	30,000			2015 2017	0 50.000	APBD	
		Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk korban bencana			50 buah	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Sosialisasi Peraturan Per-UU-an tentang PB	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang per UU-an penanggulangan bencana	terlaksananya sosialisasi peraturan per UU-an tentang PB	50 orang	Provinsi	BL	30,000			2015 2017	0 50.000	APBD	
		Geladi PB	Terlatihnya aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Terlaksananya Gladi PB	400 orang	Provinsi	BL	400,000			2015 2017	441,228 500.000	APBD	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Bulan PRB Tk Provinsi	Terwujudnya kerjasama dalam PRB di daerah	Pertemuan Anggota Forum PRB	200 orang	Provinsi	BL	150,000			2015 2017	133195 150.000	APBD	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Bulan PRB sedunia	Terwujudnya kerjasama dalam PRB secara nasional	Keikutsertaan anggota Forum pada Bulan PRB di Provinsi Lain	200 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	144512 150.00	APBD	
		Program Peningkatan kesiapsagaan dan pencegahan bencana	Terwujudnya kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman bencana				BL	1,425,000			2015 2017	-	APBD	
		Fasilitasi Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana	Terwujudnya kemampuan lembaga pendidikan dalam upaya penanggulangan bencana	Terbentuknya Sekolah aman bencana (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (30 Sekolah/ Madrasah) 10 Kab/Kota)	5 sekolah	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	142,847 150,000	APBD	
		Pembentukan Forum PRB	Tersedianya lembaga masyarakat sadar bencana	Terbentuknya Forum PRB	1 unit	Provinsi	BL	25,000			2015 2017	0 50.000	APBD	
		Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana	Terwujudnya kawasan pesisir aman bencana	terlaksananya Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana	50 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	

		Diklat unit penanganan psikososial (sarana dan prasarana)	Terlatihnya aparatur dalam penanganan psikososial korban bencana	Jumlah aparatur yang dilatih	40 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Kegiatan fasilitasi operasional satgas/tim reaksi cepat	Terlatihnya kelompok masyarakat yg handal dalam penanggulangan bencana	Jumlah penanganan bencana	3 orang	Provinsi	BL	125,000			2015 2017	0 150.000	APBD	
		Pelatihan dan Pembentukan TRC PB	Terlatih dan terbentuknya Tim Reaksi Cepat PB	Jumlah aparatur yang dilatih	5 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Optimalisasi Tim Reaksi Cepat pada penanganan bencana	Terwujudnya PB secara cepat dan tepat	Jumlah aparatur yang terlibat dalam PB	100 orang	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Pelatihan SAR bagi anggota TRC	Terlatihnya anggota TRC dalam kegiatan SAR	Jumlah anggota TRC yang terlatih dalam bidang SAR	50 orang	Provinsi	BL	150,000			2015 2017	0 150.000	APBD	
		Penyusunan SOP penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya pola kerja yang terarah dan sistematis	Tersedianya SOP penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 dok	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Bimbingan teknis manajemen dasar penanggulangan bencana	Terbinanya kemampuan teknis manajemen PB bagi aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih	40 orang	Provinsi	BL	150,000			2015 2017	0 150.000	APBD	
		Bimbingan teknis Satgas PB spesialisasi assesment	Terbinanya kemampuan spesialisasi assesment bagi Satgas PB	Jumlah aparatur yang dilatih	30 orang	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Bimbingan teknis Satgas PB spesialisasi medical action	Terbinanya kemampuan spesialisasi medical bagi Satgas PB	Jumlah aparatur yang dilatih	30 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Bimbingan teknis pengelolaan bantuan bencana	Terbinanya kemampuan Satgas PB dalam pengelolaan bantuan bencana	Jumlah aparatur yang dilatih	30 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Pendidikan dan pelatihan manajemen dasar penanggulangan bencana	Terlatihnya kemampuan teknis manajemen PB bagi aparatur	Jumlah aparatur yang dilatih	30 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Pembinaan kelinmasan dalam penanggulangan bencana	Terbinanya kemampuan kelinmasan dalam PB	Jumlah aparatur yang dilatih	30 orang	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	0 50.000	APBD	
		Program Peningkatan Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam PRB	Terwujudnya upaya Pengurangan Risiko Bencana secara terpadu dan menyeluruh				BL	470,000			2015 2017	-	APBD	
		Kajian Ulang Risiko Bencana	Terevaluasinya kondisi lingkungan terhadap ancaman kejadian bencana	Tersedianya Naskah Kajian Risiko Bencana	1 dok	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	0 50.000	APBD	
		Fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana	terwujudnya Desa Tangguh bencana	Teraksrahnya fasilitasi pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	60 orang	Kab. Lotim, Kab. Sumbawa	BL	300,000			2015 2017	540,596 600.000	APBD	
					2 desa		BL				2015 2017	-	APBD	
		Monev Kinerja Desa Tangguh Bencana	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	Tersedianya laporan kinerja desa tangguh bencana	1 dok	Provinsi	BL	20,000			2015 2017	30.489 35.000	APBD	
		Fasilitasi Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman dari ancaman bahaya kebakaran	Jumlah personil yang bertugas	40 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	

		Program Peningkatan kapasitas SDM	Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dalam PB			Provinsi	BL	450,000			2015 2017	-	APBD	
		Bimbingan teknis Satgas PB spesialisasi Kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat (KBBM)	Terbinanya kemampuan teknis Satgas PB dalam spesialisasi KBBM	Jumlah personil yang dilatih	30 orang	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	0 50.000	APBD	
		Pelatihan Tanggap darurat dan evakuasi pemuda pelajar	Terlatihnya siswa/pelajar dalam melakukan tanggap darurat dan evakuasi korban bencana	Jumlah siswa yang dilatih	40 orang	Provinsi	BL	400,000			2015 2017	0 200.000	APBD	
		Program Penanganan Darurat dan Evakuasi/ Penyelamatan Korban bencana	Terwujudnya penanganan darurat dan evakuasi korban bencana secara cepat, tepat dan berhasil guna			Provinsi	BL	1,200,000			2015 2017	-	APBD	
		Pelatihan Manajemen Logistik Pergudangan & Peralatan	Terlatihnya personil dalam manajemen logistik pergudangan dan peralatan	Jumlah aparatur yang dilatih	40 orang	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Fasilitasi Gudang Logistik & Peralatan	Tersedianya kebutuhan logistik	jumlah sarana gudang logistik	1 paket	Provinsi	BL	1,000,000			2015 2017	-	APBD	
		Monitoring dan evaluasi Kedaruratan Bencana	Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan	Jumlah laporan kedaruratan bencana	4 dok	Provinsi	BL	25,000			2015 2017	0 35.000	APBD	
		Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana alam	Terpantaunya dan tersebarluasnya informasi potensi bencana	Jumlah informasi potensi bencana yang disebarkan	1 paket	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	201.818 100.000	APBD	
		Program Siaga Darurat Bencana	Tercegah semakin meluasnya dampak bencana			Provinsi	BL	830,000			2015 2017	-	APBD	
		Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Bencana	Terwujudnya penanganan tanggapdarurat bencana yang koordinatif	Naskah kebijakan PB	1 dok	Provinsi	BL	130,000			2015 2017	126.842 120.000	APBD	
		Penyediaan dan penyimpanan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan penanganan bencana	Tersedianya sarana, prasarana dan personil tangggap darurat	Jumlah sarana prasarana yang dikelola	1 paket	Provinsi	BL	700,000			2015 2017	603.284 700.000	APBD	
		Program Tanggap Darurat Bencana	Tercegah semakin meluasnya korban dan kerugian bencana			Provinsi	BL	1,000,000			2015 2017	-	APBD	
		Monitorin dan Evaluasi penanganan bencana	Terevaluasinya kegiatan tanggap darurat	Jumlah naskah evaluasi	10 dok	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	109.170 100.000	APBD	
		penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana	Tercegahnya semakin meluasnya korban bencana	Jumlah penanganan tanggap darurat	1 paket	Provinsi	BL	900,000			2015 2017	0 1.000.000	APBD	
		Prpgram Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	Terwujudnya keberdayaan masyarakat korban bencana pasca bencana			Provinsi	BL	690,000			2015 2017	-	APBD	
		Pelatihan tentang Penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana (Jitu-Pasna)	Terlatihnya aparatur dalam melakukan penilaian kerugian dan kerusakan dampak bencana	Jumlah personil yang dilatih	40 orang	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 100.000	APBD	
		Kajian kebutuhan pasca bencana	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan korban bencana pasca bencana	Jumlah naskah kajian	2 dok	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	0 50.000	APBD	

		Pengadaan bahan banjir	Tercegahnya semakin meningkatnya risiko bencana banjir	Jumlah bahan banjir	1000 m3	Provinsi	BL	150,000			2015 2017	119,729	APBD	
					1000 lbr	Provinsi	BL				2015 2017	-	APBD	
		Fasilitasi Pelatihan terapi dan konseling psikis/trauma	Terlatihnya aparatur dalam melakukan terapi dan konseling psikis bagi korban bencana	Jumlah aparatur yang dilatih	200 orang	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Verifikasi Tingkat Kerusakan Bencana	Tersedianya informasi data kerusakan dan kerugian yang valid pasca bencana	Jumlah naskah verifikasi	10 dok	Provinsi	BL	65,000			2015 2017	68.950 75.000	APBD	
		Rapat Koordinasi teknis pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terwujudnya koordinasi penanganan bencana pasca bencana	Jumlah naskah koordinasi dan konsultasi	1 dok	Provinsi	BL	75,000			2015 2017	53.634 75.000	APBD	
		Pemulihan ekonomi produktif masyarakat berpenghasilan rendah pada daerah pasca bencana	Terwujudnya masyarakat yang mandiri pasca bencana	Tersedianya bantuan bagi korban bencana	4 paket	Provinsi	BL	100,000			2015 2017	0 105.000	APBD	
		Bimbingan Teknis Program RR	Terbinanya aparatur kab/kota dalam penguasaan program RR	Jumlah lokasi bimbingan	10 kab/kota	Provinsi	BL	50,000			2015 2017	0 75.000	APBD	
		Penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca benca	Tersusunnya Rencana RR Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dok	Provinsi	BL	25,000			2015 2017	0 25.000	APBD	